



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

Jl. Serma Lian Kosong No. 08 Kota Padangsidimpun
Telp. Dan Fax (0634) 21018

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

NOMOR : KEP- 12/L.2.15/Cr.3/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpun tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padangsidimpun Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Tahun 2023.

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan;
2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;



- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidimpuan
pada tanggal 13 Juni 2024
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN



DR. LAMBOK M.J SIDABUTAR, SH., MH
JAKSA UTAMA PRATAMA

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
7. Arsip



LAMPIRAN
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri
Padangsidimpuan
Nomor : KEP-12/L.2.15/Cr.3/06/2024
Tanggal : 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	DR. LAMBOK M.J SIDABUTAR, SH., MH Jaksa Utama Prtama (IV/b) Nip. 197203311998031004 Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan	Ketua
2	ARGA J.P HUTAGALUNG, SH., MH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198609182009121002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	YUNIUS ZEGA, SH., MH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197806282003121005 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	ALLAN HENRY BASKARA HARAHAP, SH., MH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198408102002121003 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	KHAIRUR RAHMAN NASUTION, SH.,MH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198204242008121002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	MANATAP SINAGA, SH., MH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 198203132008121002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	ELAN JAELANI, SH., MH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 197907052005011010 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	NEFTY NOVIA ARITONANG, A.Md Madya Darma (II/c) Nip. 199611202022032003 Kepala Urusan/Fungsional terkait dalam AKIP	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN



DR. LAMBOK M.J SIDABUTAR, SH., MH
JAKSA UTAMA PRATAMA

